

Implementasi Dan Dampak Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Serta Penanggulangan Sampah Plastik Dikota Batam

¹Wilda Mukhalladun Waruwu ²Etika Khairina

pb191010038@upbatam.ac.id etika@puterabatam.ac.id

^{1,2} Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam

email: etika@puterabatam.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diterima Redaksi: 26 Mei 2023

Revisi Akhir: 3 Juni 2023

Diterbitkan Online: 8 Juli 2023:

KEYWORDS :

plastic waste , policy, implementation, society, government

KORRESPONDENSI

No HP: -

E-mail: etika@puterabatam.ac.id

Abstracts

This study aims to describe the implementation of waste management policies by the Batam city government and waste management by establishing Regional Regulation No. 11 of 2013, as well as the impacts resulting from the implementation of plastic waste management and control policies in Batam city. The research method used is qualitative research method. Qualitative research is a research approach to study the state of natural objects based on post-positivist concepts, with the researcher as the main tool. Data collection techniques were carried out by observation, interviews, documentation. Other supporting data are taken from journals, literature, websites, and previous research. The results of the study show that the implementation and impact of government policies in the management and management of plastic waste in the city of Batam has been maximally implemented by the city government of Batam in providing the facilities required for waste management, such as pick-up cars, TPA, TPS, AND trash cans. Meanwhile, judging from public awareness related to the policy of managing and handling plastic waste in Batam City, public awareness is still minimal, which can be seen from the household waste that is transported at the TPA, there is no separation of various types of waste. As for the impact of the implementation of plastic waste management and recycling policies in the city of Batam, if implemented by the community, it will have an impact on environmental hygiene, public health, increase performance, and reduce environmental damage.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh pemerintah kota batam dan penggulungan sampah dengan menetapkan perda nomor 11 tahun 2013, serta dampak yang timbul akibat dari implementasi kebijakan pengelolaan dan penanggulangan sampah plastik di kota batam. Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian untuk mempelajari keadaan objek yang alamiah berdasarkan konsep post-positivis, dengan peneliti sebagai alat utamanya. Teknik pengumpulan data dialkukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Data pendukung lainnya diambil dari jurnal, kepustakaan, situs web, dan penelitian terdahulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dan dampak kebijakan pemerintah dalam pengelolaan serta penanggulangan sampah plastik dikota batam sudah di implemtasikan secara maksimal dilakukan pemerintah kota batam dilihat dari penyediaan fasilitas yang diputuskan dalam pengelolaan sampah, seperti penyediaan mobil pick up, tpa, tps, dan tong sampah. Sedangkan dilihat dari kesadaran masyarakat terkait dengan kebijakan pengelolaan dan penanggulangan sampah plastik di kota batam, kesadaran masyarakat masih minim yang dapat dilihat dari sampah rumah tangga yang di angkut di tpa belum adanya pemilahan berbagai jenis sampah. Adapun dampak dari implementasi kebijakan pengelolaan dan penggulungan sampah plastik di kota batam jika diterapkan oleh masyarakat akan berdampak pada kebersihan lingkungan, kesehatan masyarakat, peningkatan perekonomian, dan mengurangi kerusakan lingkungan.



Pendahuluan

Di era globalisasi ini berbagai permasalahan yang terjadi di beberapa negara berkembang. Salah satu diantaranya adalah negara Indonesia. Perkembangan yang terjadi di Indonesia saat ini ditandai dengan peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan pembangunan infrastruktur setiap daerah (Fonna, 2019). Hal tersebut menyebabkan munculnya masalah-masalah baru di negara berkembang terjadinya masalah perekonomian, budaya dan sosial. Permasalahan tersebut berdampak buruk pada kehidupan masyarakat seperti meningkatnya angka kemiskinan, kurangnya penyediaan pelayanan dan fasilitas umum karena belum meratanya pembangunan, dan permasalahan lingkungan (Gai et al., 2020).

Salah satu Daerah di Indonesia yang tingkat penduduknya semakin meningkat adalah Kota Batam dengan jumlah penduduk 1.196.396 jiwa berdasarkan pada Badan Pusat Statistika Kota Batam. Kepadatan tersebut menimbulkan beberapa permasalahan diantaranya permasalahan kebersihan lingkungan masyarakat yaitu meningkatnya jumlah sampah. Jumlah sampah di Kota Batam saat ini mencapai 870 Ton/hari yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir. Jika peningkatan penduduk di Kota Batam terus meningkat maka akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah sampah yang berdampak buruk terhadap keberlangsungan hidup masyarakat. Permasalahan peningkatan jumlah sampah di Kota Batam tersebut sangat diperlukan kebijakan yang tepat dari pemerintah untuk memberikan himbauan kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah masing-masing (Tambunan et al., 2021).

Merujuk pada Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menjelaskan bahwa dalam mengurangi peningkatan jumlah sampah sangat diperlukan kerja sama, peran aktif dari masyarakat dan pemerintah dengan menetapkan kebijakan bersama dan ikut berpartisipasi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut yaitu pengelolaan sampah di daerahnya (Ambina, n.d.).

Dalam menangani permasalahan jumlah sampah pemerintah Daerah Kota Batam menetapkan kebijakan tentang pengelolaan sampah yang dimuatkan pada Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2013. Dalam Peraturan Daerah tersebut tertulis bahwa masyarakat mempunyai hak, kewajiban, dan peran penting dalam pengelolaan sampah terutama pada bagian pengurangan, pemilahan, dan menjaga kebersihan lingkungan. Peran masyarakat dapat diartikan bahwa keikutsertaan individu dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi masing-masing (Margayaningsih, 2018).

Dalam Perda No 11 Tahun 2013 Kota Batam menjelaskan tentang pengelolaan sampah dan konsep pengelolaan sampah. Saat ini konsep pengelolaan sampah yang dilakukan di Kota Batam adalah *Zero Waste* menggunakan prinsip 3 R (*reduce, reuse, recycle*). Tujuan dari konsep 3R untuk memudahkan pemilahan jenis sampah yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Selain itu untuk meningkatkan pengelolaan dan pemilahan sampah terutama sampah plastik yang tidak mudah terurai, pemerintah Kota Batam menyediakan fasilitas di lingkungan masyarakat seperti mengadakan program Bank sampah, melakukan Pelatihan-Implementasi Dan Dampak Kebijakan Pemerintah 40

pelatihan pengelolaan sampah, Pengomposan sampah dan mendirikan bank sampah tingkat RT/RW.

Bank sampah merupakan tempat penabungan sampah berjenis plastik, kertas dan logam yang memiliki nilai jual yang dapat meningkatkan nilai ekonomi masyarakat dan juga mengurangi penumpukan sampah berjenis jenis plastik, kertas dan logam. Sampah Plastik merupakan sampah yang tidak mudah lapuk dalam waktu cepat yang membutuhkan proses bertahun-tahun untuk terurai. Seperti Penelitian dahulu yang (Rahmayani & Aminah, 2021), tentang efektivitas pengendalian sampah sampah menyampaikan bahwa sampah plastik adalah sampah non organik yang sulit terurai, beracun, dan mudah mencemari lingkungan untuk itu di perlukan pengelolaan sampah plastik berwawasn lingkungan.

Seperti halnya yang di jelaskan oleh (Septiani et al., 2019) dalam penelitiannya Tentang Pengelolaan Sampah Plastik di Salatiga dalam penelitannya menjelaskan bahwa dalam pengelolaan sampah melibatkan empat pihak yaitu Pemerintah, masyarakat penghasil sampah ruamh tangga, pemulung sebagi agen pemilah sampah, dan Bank sampah.

Dari penjelasan latar belakang dan penelitian terdahulu diatas tentang kebijakan pengelolaan sampah plastik, untuk itu peneliti tertarik untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang Implementasi dan Dampak Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Serta Penanggulangan Sampah Plastik Di Kota Batm

Kajian Teori

1. Kebijakan dan implementasi kebijakan

kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun pemerintah di lingkungan mereka berada dengan mnyampaikan berbagai kendala-kendala yang dihadapi dan menetapkan kesepakatan secara bersama untuk melaksanakan mencapai tujuan dari kebijakan (Syafaruddin et

al., 2020). Sedangkan menurut (Nur & Guntur, 2019) menjelaskan bahwa kebijakan adalah sebuah stategi yang disusun oleh pemerintah untuk mengarahkan pelaksanaan kebijakan.

Sedangkan menurut (Yuliah, 2020) Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan setelah ditetapkan dan dirumuskannya kebijakan yang didukung oleh sarana dan prasana untuk mencapai sasaran dari tujuan yang telah di tetapkan, implementasi kebijakan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat.

2. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah proses yang dilakukan dalam menandai sampah melalui kumpul, angkat, dan buang di tempat pembuangan sampah. proses pengelolaan sampah yang dilakukan dapat melalui kegiatan *Zero Waste* yang dilakukan secara bertahap, dan berkelanjutan. Untuk meningkatkan implemntasi kebijakn pengelolaan sampah (Salsabila, 2020)

Solusi dalam pengelolaan sampah dapat melalui program bank sampah yang dapat mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah, memberikan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, sehingga dapat menumbuhkan kembangkan kesadaran masyarakat yang dapat memberikan manfaat ekonomi, kesehata, lingkungan yang hijau, bersih dan nyaman (Athailah et al., 2021)

Metode Analisis

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif (Sugiyono, 2017) yaitu menyatakan bahwa peneliti adalah yang paling utama dalam penelitian kualitatif, dan metode pengumpulan data meliputi triangulasi (gabungan), analisis data induktif/kualitatif, dan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian untuk mempelajari keadaan objek yang alamiah berdasarkan konsep post-positivis, dengan peneliti sebagai alat utamanya. Alih-alih menggeneralisasi, kita harus fokus pada makna. Tujuan peneliti adalah **Implementasi Dan Dampak Kebijakan Pemerintah** 41

¹Wilda Mukhalladun Waruwu ²Etika Khairina

melakukan penelitian kualitatif yang menelaah pertanyaan-pertanyaan yang masih samar-samar dengan maksud untuk menggali lebih dalam tentang keadaan yang terjadi di lapangan sehingga data dan fakta dapat diperoleh.

1. Sumber Data

Untuk penelitian ini sumber data yang di peroleh berdasarkan pada (Sugiyono, 2017) :

- 1) Data Primer merupakan data yang dikumpulkan dan didapatkan langsung oleh peneliti dengan melakukan wawancara dari pihak yang telah ditentukan terlebih dahulu yang berkaitan tentang permasalahanyang diteliti. Sedangkan yang menjadi sumber data primer di peroleh dari wawancara kepala masyarakat dan Dnisa lingkungan Hidup.
- 2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung didapat dari sumbernya. Data sekunder di peroleh peneliti melalui penelitian terdahulu, buku-buku, jurnal, media cetak, website Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.

2. Metode Analisis Data

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017)menjelaskan bahwa ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menganalisis data .

1) Reduksi data

Peneliti mengumpulkan ringkasan dari data-data, inti masalah dan kebenaran informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam penelitian. Mendatangi secara langsung Dinas Lingkungan Hidup bagian dari tindakan yang dilakukan oleh peneliti untuk mudah memperoleh data. Tujuan dari penyajian data yaitu untuk melihat tingkat pemahaman dari peneliti dalam dalam memahami data yang diperoleh.

2) Penarikan kesimpulan

Masalah baru yang tidak pernah ada sebelumnya dan dibuktikan kebenaran, relevansi dengan mendeskripsikan objek permasalahan yang pada awalnya tidak adanya kepastian penyebab timbulnya permasalahan, kemudian di temukan kebenaran yang menimbulkan adanya interaksi-intraksi, hipotesis, dan memungkinnya terbentuknya teori baru setelah dilakukan penelitian Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017).

1. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah proses mengamati objek penelitian yang di lakukan oleh peneliti dengan memperhatikan langsung fenomena yang terjadi di lapangan dan mencatat hasil dari pengamatan yang dilakukan. Pada penelitian ini, yang dilakukan peneliti pada peneliti memperhatikan fenomena yang terjadi yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan kondisi objek penelitian yaitu memperhatikan proses pengelolaan sampah melalui pilhan dan pengangkutan sampah serta memperhatikan respon dari masyarakat terkait kebijakan pengelolaan sampah

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses mewawancarai beberapa orang yang berkaitan dengan objek peneliti dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dalam melakukan pembinaan dan masyarakat dengan tanggapannya dari ketetapan kebijakan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses mengumpulkan data-data untuk memperkuat pernyataan dari objek dan subjek penelitian secara tidak langsung, dokumentasi berupa foto dan bukti lainnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dari penelitian. .

Hasil Dan Pembahasan

Implementasi dari kebijakan publik yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi atau pengelolaan sampah plastik di Kota Batam menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013. Namun dukungan masyarakat dari permasalahan sampah sangat di butuhkan oleh pemerintah. Kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat adalah hal utama dalam memilih dan memilah sampah baik organik maupun anorganik sehingga dapat memudahkan para petugas lingkungan dalam pengakutan sampah (Siswati et al., 2022)

1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah

a. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan sangat mempengaruhi kesadaran masyarakat. Pada saat ini kebanyakan masyarakat hanya mengenal tempat pembuangan sampah yang dijadikan satu, sehingga menumpuknya berbagai jenis sampah. tentu ini menyebabkan meningkatnya pencemaran lingkungan. Penumpukan pembuangan satu jenis temoat sampah sampai sekang sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Sedangkan pada Perda Kota Batam telah menetapkan kebijakan bahwa masyarakat sebagai penghasil sampah diberikan tanggung jawab untuk mengelola sampah sendiri. Sedangkan tanggung jawab dari pemerintah yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Namun dilihat dari implemtasinya kebijakan Perda ternyata kesadaran masyarakat masih minim.

b. Sumber Daya

Sumberdaya yang dimaksud yaitu dukungan dari pemerintah dalam mengedukasi tentang pengelolaan sampah baik itu sumberdaya manusia ataupun sumberdaya alam terkait dengan pemilaha sampah berjenis plastik.

c. Hubungan Organisasi

Adanya organisasi yang dibentuk masyarakat merupakan salah satu dari respon masyarakat dan awal dari kesadaran masyarakat tentang pemilah jenis sampah rumah tangga contohnya pembentukan program masyarakat yang dikoordinasikan oleh RT/RW setempat dengan DLH untuk mencapai tujuan.

2. Pengelolaan Sampah dan Penanggulangan

Pengelolaan sampah dan penanggulangan sampah dilakuakandengan penerapan zero waste. Ada tiga tahapan dalam pengeloalan sampah melalui zero waste atau 3R yaitu Reduce (mengurangi), Reuse (menggunkan kembali), dan Recycle (mendaur ulang). Penggunaan konsep ini juga telah di tetapkan dalam undang-undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. aktivitas yang dapat dilakukan adalah dengan mengatasi produksi sampah, pendaur ulang sampah, dan penggunaan kembali. Jika zero waste ini dapat dijalankan semaksimal mungkin akan meberikan dampak bagi masyarakat yaitu meningkatkan kebersihan lingkungan, meningkatkan kesehatan, dan kepedulian lingkungan.

Adanya faktor penghambat ini mengakibatkan tidak tidak maksimalnya implementasi pengelolaan sampah tersebut ada beberapa faktor penghambat sebagai berikut:

- a. Kurangnya kesadaran, pemahaman, dan partisipasi masyarakat menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang proses pemilahn jenis sampah
- b. Sarana dan Prasarana menjadi pendukung utama dalam pengelolaan sampah mobil pengakutan yang dibutuhkan pada pengakutan sampah untuk pembungan di TPA/TPU.

Terkait adanya faktor penghambat dari pengelolaan sampah juga terjadi adanya dampak atau konsekuensi yang dari hal tersebut seperti hal berikut:

Sampah plastik dapat merusak ekosistem terlihat dari adanya perubahan pada sungai yang dipenuhi limbah industri maupun rumah tangga, serta hilangnya hewan-hewan di danau, sungai. Sampah plastik sulit terurai. Sampah plastik hanya mampu di daur ulang 20% sedangkan sampah plastik membutuhkan 60 tahun sampai benar-benar bisa terurai dengan sendirinya. Dari beberapa Sampah plastik sendiri dapat dikurangi dengan proses 3R (Reuse, Reduce, Recycle) sesuai dengan penjelasan di atas.

Sampah Plastik Jadi Masalah Global Tidak hanya itu sampah plastik juga menjadi permasalahan global yang dimana material dari bahan plastik sulit diuraikan, Dengan waktu urai yang lama faktanya proses atau jumlah produksi dari material bahan plastik tersebut tidak berkurang sama sekali dan bahkan menjadi gaya hidup perkotaan yang tidak lepas untuk menggunakan benda berbahan plastik.

Dari beberapa penjelasan diatas , dengan berbagai permasalahan yang terjadi pada penerapan implementasi dan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan serta penanggulangan sampah plastik di kota batam yaitu dengan zero waste dan 3R. dari pemerintahan yang menjadi faktor pemngahambat dari pengelolaan sampaha adalah biaya untuk mendukung kebijakan pemerintah serta program yang diusulkan oleh masyarakat.

Ada beberapa implikasi masukan kebijakan yakni :

1. Belum adanya suatu Peraturan turunan untuk Peraturan Presiden No 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
2. Organisasi Pelaksana yakni Unit Bank Sampah dan TPS3R jumlahnya masih sedikit dan sangat lemah kekuatannya.
3. Sumberdaya, jumlah mobil angkutan perlu ditambah karena pada dasarnya tidak cukup bila hanya menggunakan satu mobil pick up saja, sampah perlu

adanya pemilihan diantara pada sampah yang organik serta yang non organik, yang dimana sampah plastik merupakan contoh sampah yang sangat sult di uraikan.

4. Proses pemilahan sampah yang dimana sumber sampah masih menggunakan satu jenis tempat sampah
5. Frekuensi, Petugas pengangkut sampah ke Bank Sampah sudah sesuai dengan SOP namun karena kurangnya sarana dan prasarana seperti mobil pick up angkutan sampah jumlahnya terbatas pengangkutan dibuatkan penjadwalan dan dengan tonase yang sudah ditentukan dan relatif cukup lama.
6. Terkait pengurangan sampah sudah di lakukan di 12 kecamatan di Kota Batam namun tetap saja jumlahnya masih kurang;
7. Masih belum tersedianya fasilitas dari hulu, yang dimana kurangnya sosialisasi, dan peraturan turunan di tingkat daerah yang belum Disini, ada juga yang menjadi kendala implementasi pengurangan sampah ini.
8. Ketepatan Layanan, pelayanan pengurangan sampah dirasa sangat tepat untuk dilaksanakan dan juga sangat baik dikarena sangat vital perannya untuk masyarakat agar meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membuang sampah agar lebih teratur dan benar tidak membuang sampah sembarangan.
9. Kegiatan implementasi dan dampak kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah plastik di Kota Batam sudah ada akan tetapi masih lemah dan sulit terealisasi baik itu dari biaya berjalannya suatu program tersebut atau dari masyarakat juga yang kurangnya partisipasi dalam menjaga lingkungannya.
10. Kurangnya kesadaran diri masyarakat juga dapat menimbulkan hubungan sosial dan lingkungan yang tidak baik,

¹Wilda Mukhalladun Waruwu ² Etika Khairina

tercemarnya lingkungan dan menimbulkan banyak penyakit di sekitar kita.

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasn diatas dapat disimpulkan bahwa kota batam ini menetapkan suatu kebijakan, yang dimana kebijakan, kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dimana keputusan tersebut telah menyangkut pada suatu kepentingan publik ang telah dilakukan oleh pemerintah serta juga dapat melibatkan pada suatu pihak lainnya. Namun tidak hanya dari kebjakan pubik saja, melainkan ada juga

Implementasi kebijakan yang dapat disebut juga policy implementation. Dimana implementasi kebijakan itu merupakan suatu pelaksanaan yang dikendalikan oleh aksi-aksi suatu kebijakan dalam suatu rentang dan waktu tertentu disini, implementasi dari suatu kebijakan publik yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan menanggulangi serta pengelolaan pada suatu sampah plastik.

Dikota batam, telah di tetapkannya kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sampah. terkait kebiajkan tersebut masih belum maksimal dalam penerapan dan penerapannya dilingkungan masyarakat.

Kurangnya

Minimnya kesadaran pada diri masyarakat tentang pembuangan sampah pada tempatnya dan pemahaman terhadap pemilahan sampah organik dan anorganik. Perlu diketahui masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarang dan hal ini terus dilakukan oleh masyarakat apabila tidak adanya perhatian dari petugas kebersihan yang di tugaskan.

Sedangkan tentang kebijakan pemerintah tentang pengelolan sampah masih belum berjalan maksimal. Kemudian dari penyediaan fasilitas dari pemerintah sudah mulai maksimal. Sampai sekarang ini pemerintah terus mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk

memberikan pemahaman terkait dengan TP3R terus dilakukan.

Sedangkan untuk pengelolaan sampah plastik berdasarkan pada peraturan pemerintah Kota Batam Belum berjalan maksimal pengelolaan di sebabkan dari kesadaran dan partisipasi masyarakat setempat. Untuk itu dapat simpulkan bahwa pemerintah Kota Batam seharusnya tidak hanya berfokus dalam penetapan pengelolaan sampah tetapi lebih memfokuskan pada implementasi kebijakan di lingkungan masyarakat apakah telah sesuai dengan kebijakan dan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Daftar Pustaka

- Ambina, D. G. (N.D.). *Tinjauan Pemilahan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah A Review Of Sorting Waste According To Law No 18 Of 2008 On Waste Management*.
- Athaillah, A., Numairi, A. S., As-Shidqi, M. H., Basit, K. A., & Wahyuni, I. R. (2021). Membangun Jaringan Bank Sampah Sebagai Solusi Penanganan Sampah Serta Menumbuhkan Sirkular Ekonomi Masyarakat Desa Hantakan. *Proceedings Uin Sunan Gunung Djati Bandung*, 1(28), 54–65.
- Fonna, N. (2019). *Pengembangan Revolusi Industri 4.0 Dalam Berbagai Bidang*. Guepedia.
- Gai, A. M., Witjaksono, A., & Maulida, R. R. (2020). *Perencanaan Dan Pengembangan Desa*. Dream Litera Buana.
- Margayaningsih, D. I. (2018). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa. *Jurnal Publiciana*, 11(1), 72–88.
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). Analisis Kebijakan Publik. *Makassar: Publisher Unm*.
- Rahmayani, C. A., & Aminah, A. (2021). Efektivitas Pengendalian Sampah Plastik Untuk Mendukung Kelestarian Lingkungan Hidup Di Kota Semarang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 18–33.
- Salsabila, L. (2020). Analisa Efektifitas Bank Sampah Sebagai Alternatif Pengelolaan Sampah Dalam Mencapai Smart City Di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 21–29.
- Septiani, B. A., Arianie, D. M., Risman, V., Handayani, W., & Kawuryan, I. S. S. (2019). Pengelolaan Sampah Plastik Di Salatiga: Praktik Dan Tantangan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17(1), 90–99.
- Siswati, L., Eterudin, H., Setiawan, D., Ratnaningsih, A. T., & Yandra, A. (2022). Penyadaran Kepada Ibu Rumah Tangga Dalam Pemisahan Sampah Organik Dan Anorganik Rumah Tangga Di Kecamatan Minas. *Diklat Review: Jurnal Manajemen*
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Alfabeta, C).
- Syafaruddin, S., Napitupulu, D. S., & Harahap, A. S. (2020). Komunikasi Interpersonal Kepala Sekolah Dalam Pengambilan Keputusan Dan Peningkatan Mutu Di Sma Al-Ulum Kota Medan. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(01), 227–238.
- Tambunan, S. W. S., Prastya, I. Y., & Kurnianingsih, F. (2021). Implementasi Kebijakan Pembatasan Plastik (Studi Kasus Kelurahan Sungai Langkai, Di Kota Batam). *Student Online Journal (Soj) Umrah-Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(1), 489–496.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2), 129–153.